



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : INDAH PUSPITASARI

NIK : 6471057005670001

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Unit Kerja : RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

Sub Unit Kerja : DIREKSI

Jabatan : DIREKTUR

Jenis Laporan : Periodik - 2025

Tanggal Kirim : 3 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UNIT KERJA : RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDAH PUSPITASARI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **155393**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.169.453.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/69 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 632.727.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 405.441.000
3. Tanah Seluas 201 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 57.285.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 390.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 460.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.197.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.216.453.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.216.453.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.